

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN LUMBUNG DESA DI KABUPATEN TABANAN, BALI *)

I WAYAN BUDIASA, NYOMAN GEDE USTRIYANA, DAN IGAA LIES ANGGRENI

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana

ABSTRACT

Lumbung desa is a food institution in the village level that supports the food security improvement program (*Desa Mandiri Pangan*) in rural area. This study aims to assess the social perception toward development of *lumbung desa* in Tabanan Regency.

Survey method was used to collect primary data from 60 households through non proportional random sampling in Riang Gede Village, Penebel District and Belimbing Village, Pupuan District. By using descriptive analysis, it was found that the social perception toward *lumbung desa* development in study area fell into good category. It means that, the *lumbung desa* in the study area was required. Therefore, it is suggested that the local government should support the *lumbung desa* development program.

Key words: lumbung desa, food security, perception.

ABSTRAK

Lumbung desa merupakan salah satu bentuk kelembagaan pangan di tingkat desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan di wilayah perdesaan dan untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap pengembangan lumbung desa di Kabupaten Tabanan.

Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data primer dari 60 rumah tangga yang diambil secara *non proportional random sampling* di Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel dan Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Dengan analisis deskriptif, diperoleh bahwa persepsi masyarakat terhadap pengembangan lumbung desa di lokasi penelitian terkategori baik. Hal ini mengindikasikan, bahwa lumbung desa dibutuhkan di wilayah studi tersebut. Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan lumbung desa di wilayah studi.

Kata kunci: lumbung desa, ketahanan pangan, persepsi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konsep otonomi daerah diharapkan berbagai potensi yang ada di daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program pembangunan pertanian secara berkelanjutan termasuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Diketahui, bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga terwujudnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat dan penanganannya berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan, dan budaya lokal (UU No. 7 Tahun 1996). Oleh karena itu, alternatif kelembagaan pangan pedesaan menjadi sangat strategis yang dapat menjamin ketahanan pangan rumah-tangga.

Propinsi Bali dengan luas wilayah 5.632,86 Km², terbagi kedalam 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota. Penggunaan lahan pertanian, produktivitas, dan

produksi 7 (tujuh) komoditas pangan utama di Propinsi Bali Tahun 2006 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas tanam, produktivitas dan produksi pangan di Propinsi Bali tahun 2006

Komoditas	Luas lahan (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
Padi	145.795	55,85	480.892
Jagung	19.235	27,76	78.104
Ubi jalar	6.688	127,16	92.078
Ubi kayu	8.158	127,91	159.059
Kedele	7.548	14,32	10.845
Kacang Tanah	10.548	13,43	18.040
Kacang Hijau	859	9,73	1.259

Sumber: Bappeda Propinsi Bali (2006)

Produksi gabah kering giling (GKG) di Propinsi Bali pada Tahun 2006 tercatat sebesar 840.892 ton. Dengan rendemen sebesar 63,2 persen maka produksi beras di Propinsi Bali pada tahun yang sama diperkirakan sebanyak 531.443,74 ton. Dengan asumsi konsumsi beras sebanyak 115 kg/kapita/tahun, maka produksi

*) Sebagian dari hasil "Studi Kemungkinan Pengembangan Lumbung Desa dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah-Tangga di Kabupaten Tabanan, Bali" yang merupakan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II 2009.

beras tersebut seharusnya mampu memenuhi konsumsi Tahun 2006 sekitar 393.599 ton untuk sekitar 3.422.600 jiwa penduduk. Namun, realisasi penyaluran beras untuk sekitar 118.447 RT miskin (raskin) yang tersebar di Propinsi Bali Tahun 2006 mencapai 12.410,88 ton (Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Bali, 2007). Informasi tersebut mengindikasikan bahwa di Propinsi Bali masih terdapat beberapa daerah yang mengalami rawan pangan dan rawan kemiskinan.

Dari sawah seluas 22.479 Ha di Kabupaten Tabanan diperoleh luas tanam 45.920 Ha dengan luas panen 43.109 Ha dan produksi 223.107 ton sehingga rata-rata tingkat produktivitas lahan sawah sebesar 5,175 ton GKP/Ha pada tahun 2007 (BPS Kabupaten Tabanan, 2008a). Dengan menggunakan rendemen 63,2 persen maka diperoleh 141.003,6 ton beras per tahun atau rata-rata jumlah stok beras perkapita per tahun sebanyak 340,41 kg. Dengan asumsi konsumsi beras sebanyak 115 kg per kapita per tahun maka secara teoritis Kabupaten Tabanan telah berswasembada beras dengan tingkat surplus 66,22 persen. Melihat angka produksi padi tersebut, maka Kabupaten Tabanan merupakan penyangga utama dalam penyediaan beras, dimana pada tahun 2007 mampu menyumbang produksi sebanyak 223.107 ton GKP atau 141.003,6 ton beras (26,53%) dari total produksi yang ada di Bali. Oleh karena itu pula, sejak dahulu Kabupaten Tabanan mendapat sebutan lumbung padi bagi Provinsi Bali. Permasalahan yang dihadapi petani maupun para pelaku agribisnis pangan, khususnya beras sampai saat ini antara lain: (1) panen raya yang terjadi seringkali bersamaan dengan datangnya musim hujan (2) terjadinya masalah klasik dimana harga komoditi pangan khususnya beras akan turun pada musim panen tiba, sehingga petani menerima nilai tukar yang rendah.

Saat ini, sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan pedesaan semakin sulit ditemukan. Kemungkinan alasannya adalah: (1) semakin kecilnya ukuran usahatani dan semakin merosotnya nilai tukar petani sehingga tak dapat lagi menyisihkan sebagian produksinya untuk disimpan di lumbung desa; (2) berubahnya sistem panen dari cara gotong-royong menjadi sistem tebasan (menjual padi di lahan) sehingga tak dapat lagi menyimpan padi di lumbung; dan (3) adanya lumbung nasional (BULOG) yang dianggap dapat menggantikan peran lumbung desa dengan asumsi keberhasilan Indonesia untuk swasembada beras. Tampaknya, BULOG hanya mampu sebagai stabilisator harga dan tidak mampu menyerap produksi petani, juga tidak cukup mampu mendistribusikan bahan pangan ke desa tepat waktu dan jumlah (Sibuea, 2009).

Di masa mendatang, untuk menjamin *Desa Mandiri Pangan*, yaitu desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara

berkelanjutan, maka sistem lumbung seperti lumbung desa menjadi sangat sangat strategis. Lumbung desa dapat diharapkan sebagai lembaga ekonomi pedesaan (BUMDES) yang berbadan hukum sebagai bagian dari sistem pembiayaan usahatani melalui penyediaan kredit bagi petani dan bagian dari sistem pemasaran dengan fungsi distribusi dan fungsi logistik yang mandiri dan tangguh. Kelembagaan lumbung desa juga merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mengatasi gejolak harga gabah, dengan mengembangkan manajemen stok disertai distribusi secara optimal yang mempunyai tujuan, yaitu (1) mengintegrasikan subsistem produksi dan pasar, sehingga menjamin adanya kepastian harga produk tanaman pangan yang dapat memperbaiki pendapatan petani, (2) memasyarakatkan dan memperkuat sistem lumbung pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan ketahanan pangan, dan (3) mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan agribisnis tanaman pangan.

Pembinaan lumbung desa yang sebelumnya *top down* nampaknya perlu diubah dan lebih berdasarkan pada kebutuhan masyarakat pedesaan (*bottom up*) dan berbasis pada lembaga yang telah mengakar pada masyarakat. Bahkan, secara formal Pemerintah melalui DPR telah mengeluarkan UU No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Zulfikar, 2008). Sistem Resi Gudang ini merupakan bentuk lain dari konsep lumbung desa yang berfungsi untuk mengelola cadangan pangan dan stabilitas harga pangan. Sistem Resi Gudang merupakan bagian dari sistem pemasaran dan pembiayaan untuk mengarahkan petani mulai beradaptasi dengan mekanisme pasar dan menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih kenaikan harga di pasar internasional. Dengan demikian, beban atau peranan pemerintah dalam menyediakan subsidi, insentif, bantuan saprodi, operasi pasar, dan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) semakin lama semakin berkurang, kecuali untuk memenuhi kebutuhan darurat. Dalam merespon gejolak pasar, petani akan menyimpan komoditasnya di dalam gudang saat harga jatuh, dan menjualnya saat harga membaik. Oleh karena itu, konsep lumbung desa modern melalui Sistem Resi Gudang sebagai sebuah pola pembinaan petani untuk beradaptasi dan menggunakan mekanisme pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kebutuhan *food security* di era pasar bebas serta menjawab tantangan dan prospek pasar global bagi komoditas pertanian Indonesia pada umumnya dan Bali dan Tabanan pada khususnya.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Tabanan terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa. Keberadaan kelembagaan pangan seperti halnya lumbung desa yang dibangun dari masyarakat sebagai kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi, aksesibilitas, dan

konsumsi) sangat relevan dan mendesak dalam upaya mensukseskan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di daerah. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan (stok) pangan daerah, merupakan salah satu sasaran ketahanan pangan yang tertuang dalam kebijakan umum serta untuk memenuhi komitmen ketahanan pangan 2006-2009 (Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Bali, 2007). Kelembagaan pangan tersebut sebaiknya dikembangkan dari lembaga yang telah mengakar pada masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya sehingga nantinya mampu berperan sebagai lembaga pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memantapkan ketahanan pangan, melalui pengembangan kelembagaan pangan. Persepsi yang baik dari masyarakat menjadi referensi yang kuat bagi kebutuhan pengembangan kelembagaan pangan berupa lumbung desa untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah-tangga perdesaan.

METODOLOGI

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di 2 (dua) kecamatan yang masing-masing merupakan sentra produksi padi terbesar dan terkecil di Kabupaten Tabanan serta terdapat rumah-tangga yang masih menggunakan lumbung padi. Selanjutnya, pada masing-masing kecamatan juga dipilih secara purposif sebanyak satu desa sebagai sentra produksi padi dan terdapat desa pakraman (desa adat) yang memiliki LPD serta terdapat rumah-tangga yang menggunakan lumbung padi. Selanjutnya di setiap desa akan dilakukan pemilihan sampel secara *non proportional random sampling* sebanyak 30 sampel rumah tangga yang memiliki lumbung padi dan 30 sampel rumah-tangga yang tidak memiliki lumbung. Dengan demikian, jumlah seluruh sampel harapan dalam penelitian ini adalah 120 rumah tangga yang terdiri atas 60 rumah tangga yang menggunakan lumbung padi dan 60 rumah-tangga yang tidak memiliki lumbung padi.

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode survey menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (Singarimbun dan Effendi, 1989). Data primer yang dikumpulkan dalam studi ini adalah (1) karakteristik responden, dan (2) persepsi masyarakat yang diukur dari tingkat pengetahuan dan sikapnya terhadap bentuk usaha, bentuk fisik dan struktur, fungsi, basis pengelolaan, organisasi pengelola, dan sumber permodalan lumbung desa. Data sekunder diperoleh dari berbagai institusi atau referensi, diantaranya dari Kantor Desa, Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, dan hasil studi lumbung desa dan ketahanan pangan lainnya. Selanjutnya, kuesioner yang dipergunakan untuk mengumpulkan data primer terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Nilai validitas menunjukkan sejauhmana kuesioner itu mampu mengukur sesuatu yang ingin diukur, sedangkan nilai

reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana kuesioner tersebut dapat dipercaya dan diandalkan sebagai alat ukur. Untuk pengujian validitas kuesioner, dilakukan perhitungan korelasi antara masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi *product moment*:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana r adalah nilai korelasi *product moment*, X adalah skor masing-masing pertanyaan atau pernyataan, Y adalah skor total, XY adalah skor masing-masing pertanyaan atau pernyataan dikalikan skor total, dan N adalah jumlah sampel. Apabila nilai validitas yang diperoleh lebih besar dari 0,632 (taraf signifikansi 5 %) atau 0,765 (taraf signifikansi 1 %), berarti pertanyaan atau pernyataan tersebut valid atau konsisten (Singarimbun dan Effendi, 1989). Untuk uji reliabilitas dipilih teknik belah dua, yaitu dengan mengelompokkan pertanyaan atau pernyataan menjadi dua kelompok/belahan (bernomor ganjil dan genap) dengan syarat kuesioner yang diuji haruslah memiliki cukup banyak pertanyaan atau pernyataan, yaitu sekitar 50-60 item. Skor total belahan pertama (nomor ganjil) dikorelasikan dengan skor total belahan kedua (nomor genap) dengan teknik korelasi *product moment*:

$$r_{1.2} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana X adalah skor total belahan pertama, dan Y adalah skor total belahan kedua. Angka korelasi yang diperoleh ($r_{1.2}$), selanjutnya dikoreksi dengan rumus:

$$r_{tot} = \frac{2(r_{1.2})}{1 + r_{1.2}}$$

dengan harapan angka korelasi yang diperoleh (r_{tot}) lebih besar dari angka korelasi sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1989). Selanjutnya, hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner dapat disajikan pada Lampiran 1.

Analisis deskriptif mengenai persepsi masyarakat Kabupaten Tabanan terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa didasarkan pada skala likert. Metode deskriptif adalah metode penyajian analisis penafsiran data yang ada dengan tujuan mendeskripsikan suatu fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disertai dengan interpretasi terhadap faktor-faktor yang ada di lapangan (Singarimbun dan Effendi, 1989). Untuk menelaah persepsi masyarakat tersebut dilakukan pengukuran terhadap indikatornya dengan metode skoring. Teknik skoring yang digunakan sesuai dengan skala lima, yang terdiri atas lima bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Pengukuran dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban/tanggapannya. Masing-masing skor menggambarkan derajat persepsi dari responden. Makin tinggi skor yang diperoleh dari responden dalam

menjawab setiap pertanyaan dan/atau pernyataan, makin baik pula persepsi dari responden terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa. Ada lima pilihan jawaban dalam setiap pertanyaan/pernyataan, skor 5 diberikan untuk jawaban yang paling diharapkan dan skor 1 untuk jawaban yang paling tidak diharapkan. Dari data skor yang diperoleh kemudian dihitung kelas interval dengan menggunakan rumus (Dayan, 1978):

$$i = \frac{\text{jarak}}{\text{kelas}}$$

dimana *i* adalah kelas interval, *jarak* adalah persentase skor maksimal dikurangi persentase skor minimal, dan *kelas* adalah banyaknya kelas yang diinginkan. Dengan menggunakan nilai interval kelas dapat diketahui kategori persepsi masyarakat terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa (Tabel 2). Selanjutnya, nilai kelas interval pada kategori pengetahuan dan sikap yang merupakan faktor pembentuk persepsi seperti tertuang pada Tabel 3.

Tabel 2. Kategori persepsi masyarakat berdasarkan pencapaian skor maksimal terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa

No	Persentase pencapaian dari skor Maksimal	Persepsi
1	> 84 s.d 100	Sangat baik
2	> 68 s.d 84	Baik
3	> 52 s.d 68	Cukup
4	> 36 s.d 52	Tidak baik
5	20 s.d 36	Sangat tidak baik

Tabel 3. Kategori pengetahuan dan sikap masyarakat berdasarkan pencapaian skor maksimal terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa

No	Persentase pencapaian dari skor Maksimal	Pengetahuan	Sikap
1	> 84 s.d 100	Sangat tinggi	Sangat setuju
2	> 68 s.d 84	Tinggi	Setuju
3	> 52 s.d 68	Sedang	Tidak berpendapat
4	> 36 s.d 52	Rendah	Tidak setuju
5	20 s.d 36	Sangat rendah	Sangat tidak setuju

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Secara administratif, Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 Kecamatan, terdiri atas 123 desa dan 345 desa pekraman. Adapun nama kecamatan dan luas wilayah masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 4.

Desa Riang Gede adalah salah satu dari 18 desa yang terdapat pada Kecamatan Penebel, yang merupakan kecamatan yang terluas kedua (141,98 km² atau 16,92%) di Kabupaten Tabanan (Tabel 4). Luas wilayah Desa Riang Gede adalah 5,29 km², berpenduduk 2.899 jiwa (803 RT) sehingga kepadatan penduduknya 548,02 jiwa per km². Sumber mata pencaharian utama bagi penduduk adalah pertanian tanaman pangan sebanyak 1.623 orang, diikuti oleh peternakan 22 orang, perdagangan 52 orang, industri 15 orang, pengangkutan 10 orang, dan

pemerintahan/jasa 162 orang. Berdasarkan luas, maka penggunaan tanah Desa Riang Gede terdiri atas sawah 240 Ha, tegalan 235 Ha, pekarangan 49 Ha, kuburan 1,3 Ha, dan lainnya 3,7 Ha. Dari luas sawah yang ada di Desa Riang Gede diperoleh luas tanam 602 Ha dengan luas panen 512 Ha dan produksi 2.856,7 ton GKP pada tahun 2007 (BPS Kabupaten Tabanan, 2008b).

Tabel 4. Luas wilayah Kabupaten Tabanan menurut kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Pekaraman	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Thd. Kab. Tabanan	Persentase Thd. Prop. Bali		
1	Selemadeg	8	36	52,05	6,20	0,92		
2	Kerambitan	15	28	42,39	5,05	0,75		
3	Tabanan	11	13	51,4	6,12	0,91		
4	Kediri	15	22	53,6	6,39	0,95		
5	Marga	14	28	44,79	5,34	0,80		
6	Baturiti	12	53	99,17	11,82	1,76		
7	Penebel	18	72	141,98	16,92	2,52		
8	Pupuan	12	24	179,02	21,33	3,18		
9	Selemadeg Barat	9	37	120,15	14,31	2,13		
10	Selemadeg Timur	9	32	54,78	6,53	0,97		
Kabupaten Tabanan				123	345	839,33	100,00	14,90
Provinsi Bali						5.632,86		

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan, 2008a

Desa Belimbing dengan luas 22.49 km² merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Pupuan, yang merupakan kecamatan terluas (179,02 km² atau 21,33%) di Kabupaten Tabanan (Tabel 4). Desa Belimbing berpenduduk 6.327 jiwa (1.823 RT) dengan tingkat kepadatan 281,33 jiwa per km². Mata pencaharian utama RT di Desa Belimbing adalah pertanian tanaman pangan (540 RT) dan perkebunan (1.145 RT) diikuti dengan perdagangan 35 RT, industri 18 RT, pengangkutan 5 Rt pemerintahan/jasa 72 RT, dan lainnya 9 RT. Berdasarkan luas, maka penggunaan tanah Desa Belimbing terdiri atas sawah 355 Ha, tegalan 22 Ha, pekarangan 18 Ha, perkebunan 1.622 Ha, kuburan 1 Ha, dan lainnya 230,8 Ha. Dari luas sawah di Desa Belimbing diperoleh luas tanam 457 Ha dengan luas panen 457 Ha dan produksi 2.285 ton GKP pada tahun 2007. Berdasarkan angka tersebut maka Desa Belimbing menyumbang 33,44 persen terhadap total produksi padi di Kecamatan Pupuan yang besarnya 6.833 ton (BPS Kabupaten Tabanan, 2008c).

Karakteristik Responden

Beberapa karakteristik umum responden yang akan dibahas adalah umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan rumah tangga. Umur responden di masing-masing wilayah studi disajikan pada Tabel 5. Rata-rata umur responden di dua wilayah studi sekitar 41,9 tahun dengan kisaran 20 sampai dengan 70 tahun.

Rata rata tingkat pendidikan responden sekitar 12 tahun atau setingkat tamat SMA dan/atau sederajat dengan kisaran 0 sampai 13 tahun (Tabel 6).

Tabel 5. Umur responden

Wilayah Studi	Rata-rata Umur (Tahun)	Kisaran (Tahun)
Desa Riang Gede		
Tidak punya lumbung	43,53	25 - 69
Punya lumbung	41,77	29 - 59
Desa Belimbing		
Tidak punya lumbung	37,13	20 - 59
Punya lumbung	45,20	28 - 70

Tabel 6. Tingkat pendidikan responden

Wilayah Studi	Rata-rata Tingkat Pendidikan (Tahun)	Kisaran (Tahun)
Desa Riang Gede		
Tidak punya lumbung	10	6 - 12
Punya lumbung	10	6 - 12
Desa Belimbing		
Tidak punya lumbung	7,3	6 - 13
Punya lumbung	8,9	0 - 13

Dilihat dari prioritas penggunaan waktu, maka pekerjaan pokok responden dapat beragam (Tabel 7). Pada ketiga wilayah studi tidak terdapat responden yang berprofesi sebagai profesional/konsultan. Umumnya, responden bekerja sebagai petani pemilik, petani penggarap (buruh tani), perangkat desa, dan ada juga PNS, pegawai swasta, pedagang/wiraswasta, dan lainnya. Selanjutnya rata-rata jumlah tanggungan responden disajikan pada Tabel 8.

Persepsi Masyarakat terhadap Kemungkinan Pengembangan Lumbung Desa

Persepsi masyarakat yang diteliti meliputi pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa. Aspek lumbung desa yang ditelaah meliputi definisi, bentuk/struktur fisik, ukuran, bahan dasar, macam, kegunaan, basis pengelolaan, sistem kelembagaan, kebijakan pengembangan, dan manfaat seperti diuraikan dalam kuesioner. Setiap responden di masing-masing wilayah studi memiliki persepsi secara personal yang diukur dari tingkat pengetahuan dan sikapnya tentang berbagai aspek yang terkait dengan lumbung desa.

Berdasarkan studi ini, diperoleh persepsi masyarakat terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa pada masing-masing wilayah studi dalam kategori baik dengan persentase pencapaian skor gabungan antara responden yang tidak punya lumbung dan responden yang punya lumbung berturut-turut 70,95 persen di Desa Riang Gede dan 68,06 persen di Desa Belimbing.

Tabel 9. Persentase pencapaian skor persepsi dari skor maksimal yang dicapai masing-masing operasional variabel pada responden yang tidak punya lumbung di Desa Riang Gede

Variabel	Operasional Variabel	Jumlah Responden					Total	Skor rata-rata	
		SB	B	C	TB	STB		Skor	Kategori
Persepsi	Pengetahuan	1	4	24	1	0	30	62,73	Sedang
	Sikap	5	24	1	0	0	30	79,69	Setuju
Total							71,21	Baik	

Keterangan: SB = sangat baik; B = baik; C = cukup; TB = tidak baik; STB = sangat tidak baik

Tabel 7. Pekerjaan pokok responden

Pekerjaan Pokok	Wilayah Studi			
	Desa Riang Gede		Desa Belimbing	
	Tidak punya lumbung	Punya lumbung	Tidak punya lumbung	Punya lumbung
1. PNS/TNI/POLRI	1	1	1	0
2. Pegawai Swasta	3	3	1	0
3. Pedagang/Wiraswasta	5	1	0	3
4. Profesional/Konsultan	0	0	0	0
5. Perangkat Desa	5	8	5	2
6. Petani Pemilik Lahan	10	15	17	21
7. Buruh tani/Tukang	5	2	6	4
8. Lainnya	1	0	0	0

Tabel 8. Jumlah tanggungan rumah-tangga responden

Wilayah Studi	Rata-rata jumlah tanggungan (orang)	Kisaran (orang)
Desa Riang Gede		
Tidak punya lumbung	3,73	1 - 6
Punya lumbung	3,76	1 - 6
Desa Belimbing		
Tidak punya lumbung	2,67	0 - 5
Punya lumbung	3,63	1 - 6

Tabel 10. Persentase pencapaian skor persepsi dari skor maksimal yang dicapai masing-masing operasional variabel pada responden yang punya lumbung di Desa Riang Gede

Variabel	Operasional Variabel	Jumlah Responden					Total	Skor rata-rata	
		SB	B	C	TB	STB		Skor	Kategori
Persepsi	Pengetahuan	2	6	22	2	0	30	64,61	Sedang
	Sikap	2	25	3	0	0	30	77,15	Setuju
Total							70,68	Baik	

Keterangan: SB = sangat baik; B = baik; C = cukup; TB = tidak baik; STB = sangat tidak baik

Tabel 11. Persentase pencapaian skor persepsi dari skor maksimal yang dicapai masing-masing operasional variabel pada responden yang tidak punya lumbung di Desa Belimbing

Variabel	Operasional Variabel	Jumlah Responden					Total	Skor rata-rata	
		SB	B	C	TB	STB		Skor	Kategori
Persepsi	Pengetahuan	0	2	18	9	1	30	55,24	Sedang
	Sikap	4	21	1	4	0	30	74,44	Setuju
Total							64,84	Cukup	

Keterangan: SB = sangat baik; B = baik; C = cukup; TB = tidak baik; STB = sangat tidak baik

Tingkat pengetahuan responden terhadap lumbung desa tertinggi diperoleh dari responden yang memiliki lumbung di Desa Riang Gede dengan pencapaian skor 64,61 persen termasuk dalam kategori sedang, sedangkan tingkat pengetahuan terendah dari responden yang tidak memiliki lumbung di Desa Belimbing dengan pencapaian skor 55,24 persen (kategori sedang). Namun, secara umum diketahui bahwa responden yang mempunyai lumbung padi memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada responden yang tidak memiliki lumbung di tiap-tiap daerah studi.

Sikap masyarakat terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa di kedua desa studi termasuk dalam kategori setuju dengan pencapaian skor tertinggi sebesar 79,69 persen pada responden yang tidak mempunyai lumbung di Desa Riang Gede dan skor

Tabel 12. Persentase pencapaian skor persepsi dari skor maksimal yang dicapai masing-masing operasional variabel pada responden yang punya lumbung di Desa Belimbing

Variabel	Operasional Variabel	Jumlah Responden					Total	Skor rata-rata	
		SB	B	C	TB	STB		Skor	Kategori
Persepsi	Pengetahuan	2	5	18	5	0	30	63,33	Sedang
	Sikap	9	19	0	2	0	30	79,21	Setuju
Total								71,27	Baik

Keterangan: SB = sangat baik; B = baik; C = cukup; TB = tidak baik; STB = sangat tidak baik

terendah diperoleh sebesar 74,44 persen dari responden yang tidak mempunyai lumbung di Desa Belimbing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Tabanan terhadap kemungkinan pengembangan lumbung desa pada masing-masing wilayah studi berada dalam kategori baik dengan persentase pencapaian skor gabungan antara responden yang tidak punya lumbung dan responden yang punya lumbung berturut-turut 70,95 persen di Desa Riang Gede dan 68,06 persen di Desa Belimbing.

Dalam rangka merealisasikan dan mensukseskan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pedesaan, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali) dan/atau Pemerintah Pusat (Departemen Pertanian) untuk melakukan pilot project pengembangan lumbung desa di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel dan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Masyarakat desa di kedua lokasi studi disarankan untuk mempersiapkan diri secara intensif dan fokus dalam upaya pengembangan lumbung desa sebagai basis pengembangan agribisnis pangan sehingga mampu menuju Desa Mandiri Pangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memberikan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II. Terima kasih juga disampaikan kepada Yth.: (1) Ketut Sutapa, SSt, MT; I.B. Ketut Santika, SP; Ir. Wayan Ginarsa, SU dan Drs. Ketut Rantau, M.Si yang telah membantu Tim Peneliti dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengumpulan data serta analisis data, dan (2) Wayan Wesel Ariana (PPL Desa Belimbing) dan I Gst Nyoman Omardani (Perbekel Desa Belimbing), serta Dewa Putu Arya (Perbekel Desa Riang Gede) yang telah memfasilitasi Tim peneliti dalam pelaksanaan sosialisasi dan survey.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bali. 2006. *Data Bali Membangun 2006*. Denpasar.
- Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Bali. 2007. Laporan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Bali Tahun 2006
- BPS Kabupaten Tabanan. 2008a. Kabupaten Tabanan Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Tabanan. 2008b. Kecamatan Penebel Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Tabanan. 2008b. Kecamatan Pupuan Dalam Angka.
- Dayan, Anto. 1978. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Sibuea, P. 2009. Revitalisasi Peran Lumbung Desa untuk Atasi Rawan Pangan. <http://els.bappenas.go.id>. Download tanggal 28 Agustus 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Jakarta.
- Zulfikar, 2008. Membangun Lumbung Desa Modern melalui Sistem Resi Gudang, Solusi Atasi Krisis Pangan. *Harian Analisa Medan*, Sumatera Utara 18 Juni 2008, p. 28.